

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan

ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Walaupun demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, komponen laporan yang diinformasikan paling tidak mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan

keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam Priyama dkk (2014).

Sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) dalam Mahaputra dan Putra (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan dalam Mahaputra dan Putra (2014).

Selain sumber daya manusia, hal yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal tersebut selaras dengan penelitian Fikri Miftahul (2011) dalam Mahaputra dan Putra (2014) yang memperoleh hasil Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan dalam Mahaputra dan Putra (2014).

Hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007) dalam Arfianti (2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas

Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Arfianti (2011).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk merumuskan penelitian yang berjudul:

“PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH” (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.
3. Untuk menganalisa pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis**, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.
2. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali**, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan

fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali yang andal dan tepat waktu.

3. **Bagi Institusi pendidikan**, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai acuan untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang melandasi definisi dan teori, tinjauan penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka pikir penelitian dan perumusan hipotesis penulisan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian. Selanjutnya bab ini juga menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data,

definisi variabel serta metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian.

BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan membahas deskripsi data penelitian dan menjelaskan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya bab ini menjelaskan mengenai pengujian hipotesis, analisis dan pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data yang digunakan dan keterbatasan penelitian serta rekomendasi yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.